

RINGKASAN

Aldo Bareto Rambe 210510244 Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Penjualan Bahan Bakar Minyak Solar (Studi Putusan Nomor 268/Pid.B/Lh/2022/Pn.Bpp)

(Dr.Joelman Subaidi, S.H., M.H dan Hidayat, S.H., M.H)

Praktik penyimpanan dan penjualan kembali bahan bakar minyak dengan harga yang melambung di masyarakat telah menjadi bisnis yang menguntungkan. Namun, penting untuk menyadari bahwa penyimpanan bahan bakar minyak dalam jumlah yang melebihi batas yang ditetapkan oleh izin usaha resmi dari pemerintah daerah, dan kemudian menjualnya tanpa izin yang diperlukan, merupakan pelanggaran hukum. Tindakan tersebut dianggap sebagai tindak pidana, yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Sangatlah penting bagi kita untuk mematuhi peraturan yang berlaku guna memastikan terciptanya pasar yang adil dan sah bagi semua.

Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kompleksitas ketentuan pidana terkait penyalahgunaan transportasi dan perdagangan bahan bakar diesel, khususnya berfokus pada penerapan hukum pidana sebagaimana dibuktikan oleh Putusan Nomor 268/Pid.B/LH/2022/PN.BPP. Tujuan kami adalah menganalisis secara menyeluruh kerangka hukum yang terkait dengan penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi pemerintah, sekaligus mengkaji interpretasi dan penegakan hukum terhadap hukum-hukum tersebut sebagaimana ditunjukkan dalam putusan tersebut. Melalui kajian ini, kami bertujuan untuk mengungkap kompleksitas akuntabilitas hukum dalam ranah bahan bakar bersubsidi serta transportasi dan perdagangannya.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji secara cermat peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kasus yang sedang dibahas. Sifat penelitian ini ditandai dengan analisis deskriptif, yang memberikan pemahaman komprehensif tentang pokok bahasan.

Putusan hakim dalam Putusan Nomor 268/Pid.B/LH/2022/PN.BPP terhadap mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan transportasi dan penjualan solar bersubsidi menunjukkan bahwa pengadilan mengakui terpenuhinya unsur-unsur yang diuraikan dalam Pasal 55, yang mengakibatkan hukuman yang mencakup penjara dan denda maksimum. Namun, praktik pengenaan denda maksimum tanpa mempertimbangkan secara memadai tingkat kerugian yang ditimbulkan menunjukkan ketidakseimbangan yang meresahkan dalam penerapan keadilan. Pendekatan ini gagal menegakkan prinsip-prinsip penting keadilan dan proporsionalitas dalam penjatuhan hukuman bagi mereka yang terlibat dalam penjualan dan pengangkutan solar dan gas bersubsidi secara ilegal. Untuk mengatasi kekurangan ini, reformasi hukum yang komprehensif sangat penting, yang bertujuan untuk menetapkan hukuman yang jelas dan adil bagi para pelanggar di bidang kritis ini.

Kata Kunci : Analisis Yuridis, Tindak pidana, Pengangkutan dan Penjualan bbm solar.

SUMMARY

Aldo Bareto Rambe
210510244

Juridical Analysis of the Criminal Offense of Misuse of Transportation and Sale of Diesel Fuel (Study of Decision Number 268/Pid.B/LH/2022/Pn.Bpp)

(Dr.Joelman Subaidi, S.H., M.H dan Hidayat, S.H., M.H)

The practice of storing and reselling fuel at inflated prices has become a lucrative business. However, it is important to recognize that storing fuel in quantities exceeding the limits stipulated by official business permits issued by local governments, and then selling it without the necessary permits, is a violation of the law. This act is considered a criminal offense, subject to sanctions as stipulated in the Oil and Gas Law. Compliance with applicable regulations is crucial to ensure a fair and legitimate market for all.

This study aims to explore the complexities of criminal provisions related to the misuse of diesel fuel transportation and trading, specifically focusing on the application of criminal law as evidenced by Decision Number 268/Pid.B/LH/2022/PN.BPP. Our goal is to comprehensively analyze the legal framework related to the misuse of government-subsidized fuel, while also examining the interpretation and enforcement of these laws as outlined in the decision. Through this study, we aim to uncover the complexities of legal accountability in the realm of subsidized fuel, its transportation, and trading.

This research employs a normative legal research methodology, with a legislative approach, to carefully examine the laws and regulations relevant to the case under discussion. The nature of this research is characterized by descriptive analysis, providing a comprehensive understanding of the subject matter.

The judge's decision in Decision Number 268/Pid.B/LH/2022/PN.BPP against those involved in the misuse of subsidized diesel fuel transportation and sales indicates that the court recognized the fulfillment of the elements outlined in Article 55, resulting in penalties that include imprisonment and maximum fines. However, the practice of imposing maximum fines without adequately considering the extent of the harm caused demonstrates a troubling imbalance in the application of justice. This approach fails to uphold the essential principles of fairness and proportionality in sentencing those involved in the illegal sale and transportation of subsidized diesel fuel and gas. To address this shortcoming, comprehensive legal reform is essential, aiming to establish clear and fair penalties for violators in this critical area..

Keywords: *Juridical Analysis, Criminal Offenses, Transportation and Sales of Diesel Fuel.*